

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam sebuah negara, pemerintah memegang peran penting bagi perekonomian bangsa, sehingga pemerintah mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan serta langkah kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berbagai cara, semua kebijakan yang diambil tentunya bertujuan untuk kesejahteraan nusa dan bangsa, dimana wewenang tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/2017 tentang penetapan HET beras, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 48 tahun 2016 tentang penugasan kepada perusahaan umum (Perum) Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 16/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang rekomendasi impor produk hortikultura.

2. Dari kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah mendapat tanggapan positif dan negatif, dimana masyarakat yang berpenghasilan dari bercocok tanam khususnya para petani cabai di wilayah kecamatan Ngablak kabupaten Magelang Jawa Tengah menanggapi negatif kebijakan pemerintah dalam mengimpor cabai dan penetapan HET. Dengan adanya impor dan penetapan HET komoditas cabai berpengaruh terhadap penghasilan mereka, yang berdampak bagi beberapa aspek.

3. Islam memandang individu sebagai aktor utama dan pemerintah hanya bertindak sebagai stabilisator yang melindungi hak-hak individu, terutama hak-hak mendapat keamanan, kesejahteraan, dan jaminan sosial, Islam memperkenankan intervensi, hanya dalam kasus tertentu. Jika Islam

4. memperbolehkan intervensi, hanya terbatas pada hal-hal yang mendesak demi terlindunginya kepentingan umum, dengan syarat intervensi pemerintah benar-benar representatif dari nilai syari'ah. Dimana kebolehan intervensi hanya untuk menghilangkan kemadharatan yang sedang menimpa. Sehingga dalam melakukan intervensi seharusnya memperhatikan beberapa hal yang sangat krusial sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, khususnya para produsen, dimana dalam pembahasan ini para petani khususnya petani cabai menjadi produsen, ada banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebelum mengambil kebijakan dalam intervensi harga pasar tentang bahan pokok hasil pertanian ini. Intervensi pasar oleh pemerintah tentunya dibutuhkan, tetapi pemerintah hanya memiliki hak dan kuasa penuh terhadap pengawasan pasar, dimana ada kedhaliman disitulah peran pemerintah dibutuhkan. Dimana ada monopoli disitulah tugas pemerintah untuk menguraikan, agar tidak terjadi ketimpangan antara harga pengambilan dari petani dengan harga eceran di pasaran, dengan begitu distribusi lancar dan tidak terjadi ketimpangan harga yang terpaut amat jauh.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah

Sebagai wakil rakyat pemerintah menjadi wadah aspirasi rakyat dan menjadi motor terwujudnya aspirasi tersebut, dalam mengambil keputusan sebaiknya pemerintah bisa menimbang dan memutuskan secara baik dan bijak sehingga kebijakan tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat dari berbagai suku, wilayah dan pekerjaan.

Pemerintah memang mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan untuk melakukan intervensi pasar, seperti yang dilakukan untuk menstabilkan harga cabai, tetapi kebijakan tersebut mendapat respon positif dan negatif karena pemerintah dianggap hanya memperhatikan para konsumen. Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan untuk memantau pasar khususnya di pasar produsen untuk menstabilkan harga secara

berkesinambungan agar produsen pun merasa diperhatikan dan diuntungkan. Selain itu, kesetaraan harga pun tentunya diperlukan untuk menstabilkan harga, karena pada suatu wilayah yang menghasilkan suatu komoditas dengan kuantitas yang banyak cenderung memiliki harga jual rendah dibanding wilayah yang menghasilkan komoditas yang sama lebih sedikit, perlunya langkah dan tindakan konkrit serta profesional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah ada lagi harga sayuran menyentuh harga Rp. 500,- per kilogram, karena itu sama artinya dengan penajahan, dimana kerja keras para petani tidak dihargai dan mereka mau tidak mau harus menjualnya demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

2. Untuk penelitian selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya perlu menganalisa kebijakan pemerintah khususnya menteri pertanian dan perdagangan, sehingga dapat mengetahui seberapa besar ikatan antara menteri pertanian dengan menteri perdagangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan harapan setelah terlihatnya persoalan yang jelas memudahkan kedepannya untuk mengambil kebijakan yang lebih baik sehingga tujuan bangsa untuk memakmurkan rakyatnya khususnya petani menemui titik temu yang jelas